

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad, Bakaruddin Rosyidi, 2017, *Bahan Ajar Kebijakan Publik*, CV. Rumahkayu Pustaka Utama, Padang.

Anggara, Sahya, 2016, *Administrasi Kepegawaian Negara*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2000.

Dunn, William N., 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Indonesia.

Hadjon, Philipus M., dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2011.

Haeli, 2018, *Bahan Ajar Manajemen Aparatur Sipil Negara (Diklat Prajabatan CPNSD tenaga Honorer K2/Formasi khusus Angkatan X Lingkup Pemerintah Kabupatena/Kota Se-Nusa Tenggara Barat Tahun 2018)*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mataram.

Hartini, Sri, Setiaeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, 2010, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jilid I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Musanef, Rosdakarya, 2007, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sondang P. Siagian, 1996, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat
diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan
Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan PPPK.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 803 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor ... Tahun ... tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. (Silakan sesuaikan dengan nomor Pergub yang berlaku.)

Pengumuman Nomor: 812/5 Tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

JURNAL

Agustinus Sulisty Tri Putranto, Ichwan Santosa, 2015, *Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja: Pengertian dan Urgensinya*, Civil Service VOL. 9, No.2, November 2015

Faiq Tobroni, 2020, *Tinjauan HAM Dalam Regulasi PPPK Dengan Intertekstualitas Teks Hukum*, Jurnal HAM Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020.

M. Ikhwan Rays, Risno Mina, 2022, “*Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja: Tata Cara Pengangkatan Dan Kedudukannya.*” Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 2, 153-168.

Nurreka Sekar Arumi dan Meydika Wahista Putri, 2022, *Optimalisasi Terhadap PNS Yang Menjadi Anggota Partai Politik Berdasarkan Asas Netralitas ASN*, Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan, Sinar Dunia Vol. 1, No. 4, Desember 2022.

Tan, Winsherly, dan Dyah Putri Ramadhani. “*Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kota Batam.*” Jurnal HAM 11, No. 1 (2020): 27–37.

WEBSITE

<https://bkd.sumbarprov.go.id/>

<https://kbbi.web.id/>

<http://www.asncpns.com/2015/03/pppk-pegawai-pemerintah-dengan.html>

